

Pemkot Tangerang Datangi Lansia dan Difabel untuk Layanan e-KTP

TANGERANG (IM)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang terus mendata warga dengan mengupayakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP termasuk bagi kaum lanjut usia (lansia) dan penyandang difabel.

Bagi kelompok ini, pegawai Pemerintah Kota Tangerang melakukan cara "jemput bola" dengan mendatangi mereka, kata Kepala Seksi Pendataan Disdukcapil Kota Tangerang, Nurmalia dalam keterangannya, kemarin.

"Untuk memenuhi persyaratan dan pendataan warga yang ada di Kota Tangerang, Disdukcapil Kota Tangerang terus berupaya mendorong pembuatan e-KTP khusus bagi lansia dan kaum difabel yang ada di Kota Tangerang. Salah satu caranya dengan melakukan perekaman e-KTP khusus dengan metode jemput bola. Ini sebagai upaya

kita mencegah adanya kerumunan di masa pandemi Covid-19," ungkap Nurmalia.

Ia menambahkan bahwa untuk perekaman data e-KTP khusus bagi para lansia dan kaum difabel tidak ada jadwal khusus. "Masyarakat dibantu oleh RT atau kelurahan untuk mengajukan permohonan layanan ke Disdukcapil. Semua dipermudah, tinggal tunggu konfirmasi kapan petugas akan datang ke rumah pemohon," tambahnya.

Sementara itu, Murkasan yang mendaftarkan ibundanya yang berusia 93 tahun untuk bisa memiliki KTP mengatakan sangat terbantu dengan adanya terobosan oleh Disdukcapil Kota Tangerang. "Dengan adanya layanan ini, kami sangat terbantu dan berterima kasih. Nanti kalau sudah ada e-KTP saya bisa lebih mudah urusan administrasi kesehatan ibu saya," ujarnya. ● pp

HATI-HATI PEMBAYARAN COD!

Warga Tangerang Jual HP Malah Dibayar Pakai Uang Palsu Rp3 Juta

TANGERANG (IM)- Peredaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Ciledug, Polrestro Tangerang, mulai marak. Bagi anda yang melakukan jual beli, harus lebih waspada. Salah-salah, uang yang digunakan palsu.

Seperti yang dialami Irfan Sulaiman, warga Karang Tengah, Irfan menjual HP lewat jejaring sosial dan melakukan pembayaran dengan cara Cash On Delivery (COD). Dirinya malah mendapatkan uang palsu senilai Rp3 juta. "Peristiwa itu terjadi, pada Kamis 11 Februari 2021 lalu. Niatnya jual HP untuk dipakai tahlilan. Makanya saya jual melalui Facebook. Ternyata uangnya palsu," kata Irfan, kepada wartawan, di Ciledug, Kamis (18/2).

Dilanjutkan, mereka melakukan COD di SPBU Green Lake, Karang Tengah, Kota Tangerang. Dia menyebut, pembeli HP itu dua orang. Mereka berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. "Saya baru tahu uangnya palsu pas di rumah. Dari total transaksi Rp3,1 juta, hanya Rp100 ribu yang asli. Sisanya, senilai Rp3 juta palsu. Pas sampai rumah, saat mau dibelikan makanan, ternyata uangnya palsu," sambungannya.

Sementara itu, Kapolsek Ciledug, Kompol Wisnu Wardana membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penyelidikan. "Benar, sudah dilakukan penyelidikan oleh anggota reskrim," tukasnya. ● pp



PRODUKSI ALAT MASAK

Pekerja menyelesaikan pembuatan alat masak sutil di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (18/2). Alat penggorengan serok dan sutil berbahan stainless steel tersebut dijual dengan harga Rp40 ribu hingga Rp80 ribu per lusin tergantung ukuran.

207 Desa di Pandeglang Bakal Gelar Pilkades

PANDEGLANG (IM)- Pemkab Pandeglang bakal melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak bagi 207 desa bulan Juni mendatang. Saat ini, Pemkab tengah melakukan persiapan pelaksanaan tahapan Pilkades tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan mengatakan, ada sebanyak 207 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini dengan jumlah 1.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelaksanaan Pilkades serentak kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya karena di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga, kata dia, terjadi penambahan TPS sebagai upaya mencegah terjadinya kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkades sesuai protokol kesehatan. "Pilkades serentak kali ini penambahan TPS yang disesuaikan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Soalnya, sekarang satu TPS itu enggak boleh lebih dari 500 orang, makanya ada penambahan TPS," katanya, kemarin.

Doni mengatakan, Pemkab Pandeglang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk belanja logistik Pilkades yakni surat suara, bilik suara, dan lainnya. Selain itu, kata dia, pemerintahan desa juga menyediakan alokasi anggaran dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk honorarium Pilkades. "Kemungkinan untuk Pilkades ini bisa habis sampai Rp3 miliaran lebih lah. Kalau kita hitung satu desa Rp100 juta saja, kan udah besar. Apalagi kalau ada desa yang hak suaranya banyak," katanya. ● pra

WAKSINASI COVID-19 TAHAP KEDUA

Pemkot Tangsel Masih Godok Teknis Pendaftaran Peserta

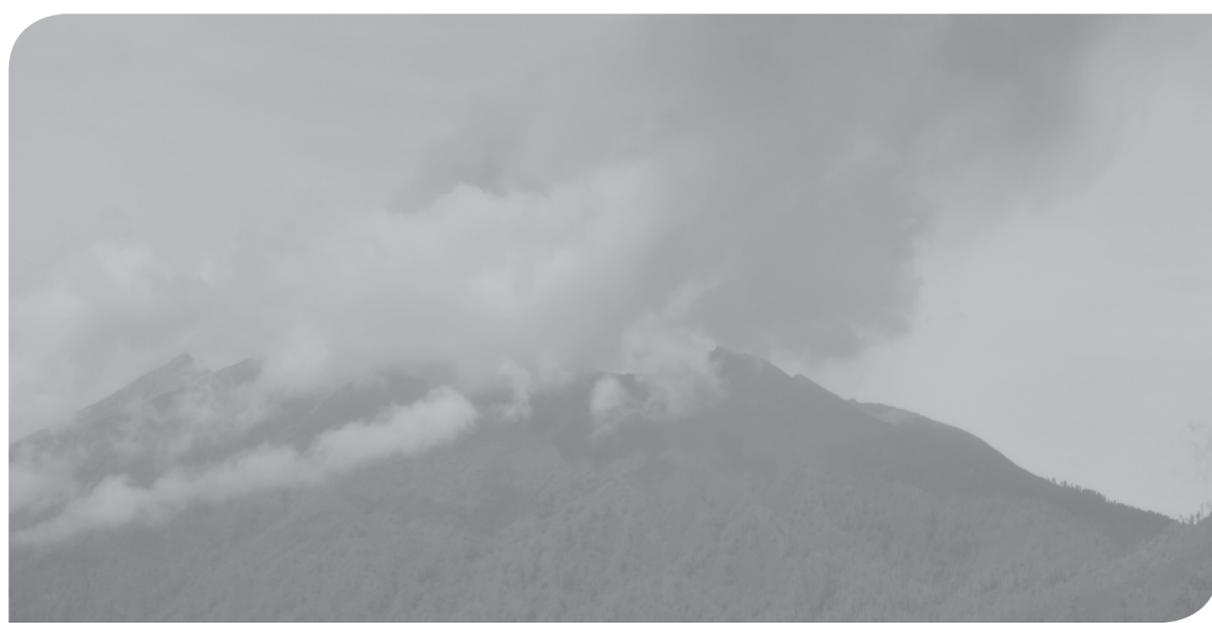
TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum menentukan teknis pendaftaran peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang diperkirakan dimulai pada akhir Februari 2021. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Deden Deni menjelaskan, pihaknya masih fokus mendata peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Sebab, masih terdapat sejumlah peserta dari sektor tertentu yang belum terdata sebagai penerima vaksin Covid-19.

"Kan awalnya itu tahap kedua hanya ASN, TNI-Polri, gitu-gitu. Di luar yang pedagang pasar, pelaku pariwisata dan perhotelan, dan yang lainnya," kata Deden saat diwawancara, Kamis (18/2).

Selain itu, lanjut Deden, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas dan pihak terkait perihal teknis pendaftaran. Tu-

juannya agar tidak mempersulit para peserta yang berasal dari berbagai unsur tersebut. "Ini kami lagi koordinasi terus bagaimana mekanismenya, kami kan juga harus mengusulkan. Jadi harus dihitung kuotanya berapa sih kebutuhan kita dengan jumlah pedagang pasar, jumlah pelaku pariwisata," ungkapnya.

Namun, dia belum dapat memastikan kapan pembahasan teknis pendaftaran dan pendataan peserta vaksinasi Covid-19 tahap kedua selesai dilakukan. Deden hanya berharap seluruh persiapan vaksinasi Covid-19 tahap kedua dalam waktu dekat. "Kami baru rapat nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah ada pola. Bagaimana yang paling bagus, paling tepat untuk program di tahap kedua ini," pungkasnya. ● pp



SEMBURAN ABU VULKANIK GUNUNG RAUNG

Semburan abu vulkanik Gunung Raung terlihat di Desa Kalianyar, Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (18/2). Data Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Raung menyebutkan asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas sedang tinggi sekitar 300-1000 meter dari puncak mengarah ke timur dan selatan, serta status gunung masih Waspada (Level II).

TEKAN PENYEBARAN COVID-19

Pengamat: Pendampingan RT/RW Jangan Sebatas Imbauan

Pendampingan oleh Camat/Lurah kepada RT/RW jangan setengah hati misalnya hanya memberikan imbauan atau sosialisasi sekali tetapi harus terus menerus. Hal ini agar koordinasi terus terjaga dan penyebaran dapat ditekan melalui pengawasan optimal.

TANGERANG (IM)- Pengamat Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengungkapkan pendampingan terhadap pengurus RT/RW oleh Pemerintah Daerah dalam menekan penyebaran Covid-19 melalui PPKM Berskala Mikro harus dilakukan secara rutin, bukan sebatas imbauan saja.

"Pendampingan oleh Ca-

mat/Lurah kepada RT/RW jangan setengah hati misalnya hanya memberikan imbauan atau sosialisasi sekali tetapi harus terus menerus. Hal ini agar koordinasi terus terjaga dan penyebaran dapat ditekan melalui pengawasan optimal," kata Riko Noviantoro di Tangerang Kamis (18/2).

Ia menuturkan tugas RT/RW di pemukiman tak mudah dalam menjaga lingkungan dengan aktifitas masyarakat

yang tinggi. Apalagi sebagian besar warga Tangerang bekerja di luar daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi dan lainnya. Sehingga perlu ada pengawasan yang intensif.

"Jangan sampai kendor ketika perubahan status zona lalu naik lagi karena lengah. Ini harus menjadi catatan bagi wilayah Tangerang Raya dengan mobilitas warga begitu tinggi," katanya.

Selain itu Riko juga mendorong kepada Pemerintah Daerah di Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang untuk melibatkan komunitas pemuda lokal sebagai satgas Covid-19 dalam menekan penyebaran di lingkungan pemukiman.

"Sudah benar upaya pemerintah gandeng RT/RW dalam penerapan PPKM Berskala Mikro. Tapi peran karang taruna yang di dalamnya

pemuda lokal juga bisa dijadikan satgas taktis yang bertugas membantu anggota keluarga yang isolasi mandiri," katanya.

Terkait peran anak muda lokal, Riko menuturkan jika perannya sangat bisa menekan sebab ruang fasilitas publik kerap diisi kegiatan pemuda/pemudi. "Ketika pemuda berganti peran sebagai pihak yang melakukan pengawasan maka akan mengurangi kerumunan," ujarnya.

Camat Benda, Achmad Suhaely mengatakan pengawasan di lapangan dilakukan oleh pegawai di tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui operasi aman bersama dengan melibatkan Kepolisian dan TNI.

Lalu pihaknya juga bersama RT/RW menyampaikan pesan kepada warga secara langsung mengenai protokol kesehatan dalam kegiatannya sehari-hari.

Wali Kota Tangerang Ar-

ief R Wismansyah sebelumnya menegaskan jika Pemkot Tangerang akan memberikan sanksi hingga menunda pemberian insentif bagi RT/RW yang lalai dan tidak proaktif dalam penerapan protokol kesehatan di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Pemberian insentif bisa ditunda, karena pandemi Covid-19 ini adalah tanggung jawab bersama dan kita harus sama-sama bekerja sama untuk dapat keluar dari pandemi ini," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Puspemkot Tangerang Kamis (17/2).

Berdasarkan tolak ukur PPKM berbasis mikro dari pemerintah pusat, Sebanyak 204 RT dari 5.117 RT di Kota Tangerang Banten berstatus zona kuning penyebaran Covid-19. "Alhamdulillah, saat ini tidak ada RT yang statusnya zona oranye dan merah penyebaran Covid-19," katanya. ● pp

BANTU PEMULIHAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI

Pemkot Tangerang Berdayakan Koperasi

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten akan melakukan pemberdayaan koperasi untuk membantu proses percepatan perkembangan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dalam pemulihan ekonomi nasional.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, di Tangerang Kamis (18/2), mengatakan upaya penguatan koperasi dilakukan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD mengenai pemberdayaan koperasi yang bertujuan memperkuat kohesi dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha koperasi. Sehingga dihasilkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah dan masyarakat guna pemberdayaan koperasi.

"Permasalahan koperasi di Kota Tangerang dapat dikelompokkan dalam empat kondisi. Pengetahuan koperasi, bisnis, kelembagaan dan peluang proyek percontohan dalam penerapan pola syaria. Dengan mengharapkan percepatan proses perekonomian yang berkembang sesuai visi Kota Tangerang," katanya dalam keterangan resmi.

Selain itu Pemerintah Kota Tangerang juga mengajukan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan kepada DPRD yang berisi mengenai urusan wajib pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Selain itu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. "Dengan Raperda yang baru diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan mutu pendidikan," katanya menegaskan.

Selain Pemkot Tangerang yang mengajukan Raperda, DPRD juga mengusulkan dua Raperda inisiatif tentang transportasi dan tata laksana kinerja DPRD.

Wakil Wali Kota, Sachrudin mengungkapkan Raperda transportasi diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan transportasi kota yang aman, nyaman, lancar, tertib dan dapat mengatasi permasalahan transportasi di wilayah Kota Tangerang. "Terkait tata laksana kinerja DPRD, kami sepakat membahas bersama sepanjang sesuai dengan amanat ketentuan yang lebih tinggi," kata Sachrudin. ● pp

6.200 Pedagang di Tangsel Masuk Kriteria Penerima Vaksin Covid-19

TANGSEL (IM)- Sebanyak 6.200 pedagang dan pengelola pasar di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menjadi penerima vaksinasi Covid-19 di gelombang kedua. Angka itu merupakan data sementara yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan yang telah memulai pendataan terhadap pedagang dan pengelola pasar di seluruh wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan Disperindag Tangerang Selatan, Maya Marcliana dalam keterangannya, Kamis (18/2).

"Sejauh ini berdasarkan pendataan kami, ada 5.600 pedagang pasar yang ada di wilayah Tangsel yang akan diupayakan mendapatkan vaksinasi Covid-19 gelombang kedua. Sedangkan 600 pengelola pasarnya juga diwajibkan menjalani proses vaksinasi. Jadi sesuai data sementara kami akan ada 6.200 pedagang dan pengelola pasar yang akan menerima vaksinasi gelombang kedua. Kalau target kita mencapai 10.000 pedagang pasar di seluruh wilayah Tangsel," ungkap Maya.

Maya sendiri mengungkapkan data tersebut didapatkan dari pendataan yang dilakukan di tujuh pasar tradisional dan enam pasar modern yang ada di wilayah Tangsel. "Kalau di luar itu, kami masih terus sasar seperti pedagang kaki lima yang kerap mangkal di pasar atau pedagang yang tidak memiliki lapak dagangan permanen di pasar tersebut. Dan saat ini kami terus bekerja sama dengan seluruh wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan Disperindag Tangerang Selatan, Maya Marcliana dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Selanjutnya, untuk gelombang pertama penyuntikan vaksin Covid-19 bagi para tenaga kesehatan, Pemkot Tangsel sendiri telah menyiapkan 67 fasilitas kesehatan. Di antaranya ada 29 puskesmas, satu Rumah Sakit Umum Tangsel, 23 rumah sakit swasta, dan 14 klinik. "Saya pikir gak akan jauh berbeda lokasinya dengan gelombang pertama, nanti kita evaluasi lagi bila memang diperlukan adanya penambahan faskes untuk penyuntikan gelombang kedua," tandas Wali Kota Tangerang Selatan, Ainun Rachmi Diary. ● pp

Kampung Tangguh Jaya Si Gacor di Tangerang Mampu Tekan Zona Merah

TANGERANG (IM)- Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, melalui Kampung Tangguh Jaya Siaga Corona (Si Gacor), mampu menekan angka kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Tangerang.

Program ketahanan pangan turut dilakukan masyarakat untuk membantu perekonomian, mulai dari budi daya ikan dan tanaman sayur dengan sistem hidroponik. Sehingga wilayah ini mampu keluar dari Zona Merah.

Posko PPKM mikro melalui Kampung Si Gacor didirikan pada tingkat kelurahan, terutama di lingkungan rukun rumah berstatus zona merah.

Secara ketat, petugas satgas Covid-19 dari unsur masyarakat bersama TNI-Polri, yang ada di lingkungan RW satu Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ini,

melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas keluar masuk lingkungan warga, dengan pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan dengan air mengalir.

Secara berkala dilakukan juga pembagian masker, serta pemukiman masyarakat disemprot disinfektan, terutama rumah yang pernah terpapar Covid-19. Bahkan, setiap rumah ditunjuk satu anggota keluarga sebagai kader ataupun satgas Covid-19.

Program ketahanan pangan posko Si Gacor memberdayakan masyarakat untuk melakukan budi daya ikan dan sayuran dengan sistem hidroponik, dalam upaya membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi.

"Penerapan Kampung Si Gacor mampu menekan angka kasus penularan, di mana periode bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 wilayah ini

berstatus zona merah dengan jumlah 253 kasus. Namun periode bulan Februari 2021 tidak ada lagi kasus," kata Ketua RW 1, Opick Bahrudin, Kamis (18/2).

Saat ini sudah tidak ada lagi kasus penularan baru, padahal sebelumnya terdapat 22 kepala keluarga terpapar yang umumnya virus berasal dari kluster keluarga.

Sementara Camat Larangan, M Marwan mengatakan penerapan Kampung Si Gacor sudah maksimal dari sebelumnya. Lebih dari 22 KK terpapar sebelumnya, sudah tidak ada. Ini berkat kerjasama tiga pilar dengan Kampung Tangguh Jaya Si Gacor.

"Lumbung pangan hasil gotong royong masyarakat sekitar juga selalu memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19," paparnya. ● pp



KAMPUNG TANGGUH MEMBANGUN KEKUATAN SOSIAL EKONOMI

Warga merawat tanaman hidroponik miliknya di Kampung Tangguh Kota Tangerang Melawan COVID-19, Larangan, Tangerang, Banten, Kamis (18/2). Dengan budidaya tanaman hidroponik, Pemerintah Kota Tangerang menggerakkan warga membangun ketangguhan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah pandemi COVID-19.